

Inovasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan: Pelajaran Dari Praktik Kebijakan Di Kota Bima

Nurfarhaty, Sri Wahyuli, Megasuciati Wardani

Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Mbojo Bima

Korespondensi Penulis : nurfarhartybima11@gmail.com

***Abstract** This research aims to explore policy innovations in poverty alleviation by drawing lessons from policy practices implemented in the city of Bima. The research utilizes a qualitative descriptive method and a literature study approach. The research is conducted at the Social Services Office of Bima City and the Regional Statistics Agency of Bima City. The discussion begins by detailing the concept of policy innovation in the context of Bima City, considering the uniqueness of local social, economic, and cultural conditions. The importance of community participation, active involvement of youth, and collaboration between the public and private sectors are highlighted. In addition, financial inclusion strategies, technological utilization, and data-driven approaches are proposed as key elements to be implemented in designing more effective policies. The results of the evaluation of existing policies, along with the proposed future agenda, provide a comprehensive view of poverty alleviation efforts in Bima City. Thus, this research contributes to the practical and theoretical understanding of how to enhance the effectiveness of poverty alleviation policies by integrating innovation and valuable lessons from policy practices at the local level.*

Keywords: Innovation, Policy, Poverty, Bima City

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui inovasi kebijakan dalam pengentasan kemiskinan dengan mengambil pelajaran dari praktik kebijakan yang telah diterapkan di Kota Bima. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan pendekatan studi literatur. Lokasi penelitian ini berada di Kantor Dinas Sosial Kota Bima, dan Dinas Statistik Daerah Kota Bima. Pembahasan dimulai dengan merinci konsep inovasi kebijakan dalam konteks Kota Bima, mempertimbangkan kekhasan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya setempat. Pentingnya partisipasi masyarakat, keterlibatan aktif pemuda, dan kerjasama antara sektor publik dan swasta menjadi sorotan. Selain itu, strategi inklusi keuangan, pemanfaatan teknologi, dan pendekatan berbasis data menjadi elemen-elemen kunci yang diusulkan untuk diterapkan dalam merancang kebijakan yang lebih efektif. Hasil evaluasi dampak kebijakan yang telah ada, bersama dengan agenda masa depan yang diusulkan, memberikan pandangan komprehensif terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Kota Bima. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman praktis dan teoritis tentang cara meningkatkan efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan dengan menggabungkan inovasi dan pelajaran berharga dari praktik kebijakan di tingkat lokal.

Kata kunci: Inovasi, Kebijakan, Kemiskinan, Kota Bima

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan sebuah realitas yang menghantui masyarakat di berbagai belahan dunia, sehingga mewujudkan kompleksitas tantangan pembangunan berkelanjutan (Dewi, & Kusumawati, 2017). Di tengah kompleksitas ini, upaya pengentasan kemiskinan tidak lagi dapat bergantung pada pendekatan konvensional, melainkan menuntut inovasi yang mendalam dalam kebijakan pembangunan (Lestari, & Suwignyo, 2016). Kota Bima, sebagai studi kasus inspiratif, memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana inovasi kebijakan dapat menjadi pilar utama dalam memerangi kemiskinan dan menciptakan perubahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakatnya (Gunawa & Mardanugraha, 2018).

Kota Bima bukan hanya menyajikan statistik kemiskinan yang menurun, tetapi juga merangkul inovasi dalam setiap aspek kebijakan pengentasannya. Penelitian ini bertujuan

untuk membahas secara rinci dan mendalam terkait praktik yang telah diimplementasikan di Kota Bima, menyoroti setiap langkah yang diambil, hambatan yang dihadapi, dan dampak yang dihasilkan. Melalui analisis ini, kita dapat mendapatkan wawasan mendalam tentang bagaimana inovasi kebijakan dapat menjadi katalisator nyata dalam mengubah paradigma pembangunan dan mengentaskan kemiskinan.

Kota Bima, dengan keragaman sosial, ekonomi, dan budaya, memberikan konteks yang unik untuk memahami tantangan pengentasan kemiskinan. Inovasi kebijakan di sini tidak hanya berfokus pada sisi ekonomi, tetapi merambah ke aspek-aspek sosial, pendidikan, kesehatan, dan partisipasi masyarakat. Pembahasan akan dimulai dengan konteks global dan nasional kemiskinan, melihat bagaimana masalah ini telah menjadi fokus perhatian dunia dan bagaimana berbagai negara menghadapi tantangan ini.

Selanjutnya, pendekatan holistik dalam pengentasan kemiskinan akan dianalisis, menyoroti pentingnya integrasi kebijakan untuk mencapai dampak maksimal. Selain itu, pendahuluan ini akan merinci konsep inovasi dalam kebijakan pembangunan, membahas bagaimana Kota Bima menerapkan gagasan-gagasan inovatif ini dalam konteksnya sendiri. Teknologi dan penggunaan data dalam pengentasan kemiskinan juga menjadi sorotan utama, menggambarkan bagaimana Kota Bima memanfaatkan perkembangan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan.

Pengalaman Kota Bima dalam merancang kebijakan pengentasan kemiskinan menjadi inti dari pembahasan ini. Sebagai sebuah komunitas yang beradaptasi dengan dinamika global, Kota Bima menunjukkan bagaimana partisipasi aktif masyarakat dapat membentuk kebijakan yang lebih responsif dan relevan. Aspek-aspek keberlanjutan dan skala yang diaplikasikan dalam praktik kebijakan Kota Bima akan diulas, mengidentifikasi apakah model yang berhasil diadopsi oleh kota Bima dapat diadaptasi oleh wilayah lain.

Oleh karena itu tujuan penelitian ini untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang peran kunci inovasi kebijakan dalam pengentasan kemiskinan, dengan Kota Bima sebagai cerminan keberhasilan dan tantangan yang dihadapi. Dengan demikian, manfaat dari penelitian ini untuk merinci pandangan yang mendalam tentang bagaimana inovasi kebijakan di tingkat lokal dapat menjadi katalisator bagi transformasi nasional dan global dalam menghadapi tantangan kemiskinan yang terus berlanjut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan pendekatan studi literatur. Pendekatan studi literatur (*literature review*) adalah metode penelitian yang penting

untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis literatur terkait topik tertentu. Dalam hal ini, studi literatur dapat digunakan untuk menyusun landasan teoritis dan konseptual yang kuat untuk inovasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Kota Bima.

Lokasi penelitian ini berada di Kantor Dinas Sosial Kota Bima, dan Dinas Statistik Daerah Kota Bima, lokasi tersebut sangat strategis dalam melihat studi kasus dan permasalahan yang terjadi. Subyek penelitian ini dipilih melalui teknik *nonprobability sampling*, dengan menggunakan teknik *purposive sampling* atau teknik penentuan sampel dengan mempertimbangkan aspek tertentu. Teknik pengumpulan data terdiri atas observasi (*observation*), wawancara (*interview*), dan dokumentasi (*documentation*). Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap dari lapangan, tahap berikutnya yang harus dilakukan adalah tahap analisa data. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa data model interaktif menurut Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga hal utama, yaitu; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya inovasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Kota Bima merujuk pada kekhasan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya setempat. Sebab pengembangan kebijakan yang inovatif perlu mempertimbangkan karakteristik unik masyarakat Kota Bima, termasuk struktur sosial, pola pekerjaan, dan tantangan kemiskinan yang spesifik.

Analisis mendalam terhadap kondisi kemiskinan di Kota Bima menjadi dasar pembangunan kebijakan yang efektif. Data dan statistik terkini tentang tingkat kemiskinan, distribusi pendapatan, dan indeks ketidakesetaraan memberikan pemahaman yang mendalam tentang dimensi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Kota Bima.

Kebijakan pengentasan kemiskinan yang telah diterapkan di Kota Bima memberikan wawasan tentang upaya pemerintah dan organisasi terkait dalam mengatasi masalah kemiskinan. Evaluasi terhadap keberhasilan dan kekurangan kebijakan-kebijakan tersebut menjadi landasan untuk penyempurnaan dan inovasi kebijakan ke depannya.

Selain itu mengidentifikasi praktik terbaik di bidang pengentasan kemiskinan menjadi fokus utama dalam pembahasan untuk menemukan model-model sukses baik yang berasal dari Kota Bima sendiri maupun pengalaman praktik terbaik di tempat lain yang dapat diadopsi dengan penyesuaian. Perbandingan praktik pengentasan kemiskinan di Kota Bima dengan praktik di daerah lain, baik dalam negeri maupun internasional, memberikan gambaran tentang variasi pendekatan dan strategi yang dapat menjadi inspirasi atau bahan pertimbangan.

Strategi Pengentasan Kemiskinan Berbasis Teknologi dan Inovasi Digital

Dalam menghadapi perkembangan teknologi, pembahasan mencakup strategi pengentasan kemiskinan berbasis teknologi, termasuk program-program digital dan solusi inovatif lainnya yang dapat meningkatkan akses dan efektivitas.

Keterlibatan teknologi dan inovasi digital dalam pengentasan kemiskinan membuka ruang baru untuk efisiensi dan efektivitas. Pendekatan inovatif melalui aplikasi teknologi dapat meningkatkan aksesibilitas, transparansi, dan efisiensi dalam implementasi kebijakan.

Data dan teknologi diidentifikasi sebagai alat penting dalam pengambilan keputusan kebijakan. Penggunaan teknologi informasi dan sistem informasi geografis (SIG) memainkan peran penting dalam merinci dan memahami kondisi kemiskinan di tingkat mikro.

Demikian di Kota Bima, upaya penyediaan akses Internet sebagai langkah peningkatan akses infrastruktur teknologi di Kota Bima, seperti jaringan internet yang luas dan terjangkau, yang memungkinkan masyarakat miskin untuk terhubung dengan dunia online dan memperoleh manfaat dari sumber daya dan peluang yang tersedia.

Kemudian melalui Program Pelatihan Teknologi Digital, dimana melalui Program ini meliputi pelatihan keterampilan digital bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan literasi digital, keterampilan komputer, dan pemahaman tentang pemanfaatan teknologi untuk kepentingan mereka. Pelatihan ini dapat mencakup penggunaan perangkat dan aplikasi digital, serta keterampilan yang relevan dalam konteks pekerjaan atau kewirausahaan digital.

Selain itu pengembangan akses Platform Perekonomian Digital dilakukan untuk mendorong pemanfaatan platform online dan model bisnis digital untuk memberikan akses pasar, kesempatan kerja, dan usaha mikro bagi masyarakat miskin di Kota Bima. Ini mencakup peningkatan kehadiran bisnis lokal di *platform e-commerce*, kemitraan dengan penyedia layanan online, dan akses ke modal usaha digital.

Kemudian yang paling penting adanya Inovasi Digital dalam Sektor Pelayanan Publik. Dengan menerapkan inovasi digital dalam penyediaan layanan publik, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi pemerintahan. Contohnya adalah penggunaan *telemedicine* untuk memberikan akses kesehatan kepada masyarakat miskin yang sulit terjangkau, atau penggunaan aplikasi e-learning untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak di lingkungan terpencil.

Pemerintah Kota Bima juga mendorong kemitraan antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan lembaga nirlaba dalam pengembangan dan implementasi program pengentasan kemiskinan berbasis teknologi dan inovasi digital. Kolaborasi ini dapat melibatkan pemberian

dana atau sumber daya teknologi dari sektor swasta, serta keahlian dan jaringan yang dimiliki oleh lembaga nirlaba.

Pentingnya Pendekatan Multi-sektoral

Pembahasan menganalisis pentingnya pendekatan multi-sektoral dalam kebijakan pengentasan kemiskinan. Kerja sama antar sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi diidentifikasi sebagai kunci kesuksesan kebijakan.

Pendekatan multi-sektoral sebagai inovasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Kota Bima, yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi yang efektif dalam mengatasi kemiskinan secara holistik dengan melibatkan berbagai sektor terkait. Pendekatan ini mencerminkan pengakuan bahwa kemiskinan bukan hanya masalah satu sektor, melainkan dampak dari berbagai faktor yang saling terkait dan kompleks.

Pertama, pendekatan multi-sektoral mencakup kerja sama antara berbagai sektor pemerintahan seperti kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, infrastruktur, dan sosial untuk merancang kebijakan dan program yang saling menguatkan dan berintegrasi satu sama lain. Hal ini menciptakan sinergi di antara sektor-sektor tersebut dalam upaya menangani berbagai dimensi kemiskinan. Dimana sektor kesehatan berkolaborasi dengan sektor pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan kesehatan, sektor ketenagakerjaan bekerja sama dengan sektor sosial untuk melibatkan masyarakat miskin dalam program pelatihan kerja, dan sektor infrastruktur bekerja sama dengan sektor kesehatan untuk meningkatkan aksesibilitas fasilitas kesehatan di daerah miskin.

Pendekatan multi-sektoral ini juga melibatkan partisipasi aktif dari pemangku kepentingan utama seperti pemerintah daerah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan sektor swasta. Kolaborasi ini penting untuk memastikan adanya kesepakatan dan komitmen bersama dalam merancang, mengimplementasikan, dan memantau kebijakan dan program yang efektif dalam mengentaskan kemiskinan.

Selain itu, pendekatan multi-sektoral juga melibatkan analisis situasi dan pemahaman mendalam mengenai kondisi lokal di Kota Bima. Ini meliputi identifikasi dan pemetaan kemiskinan, pemahaman terhadap tantangan dan hambatan yang dihadapi masyarakat miskin, serta potensi dan sumber daya yang ada dalam komunitas. Melalui pemahaman ini, kebijakan dan program dapat lebih terarah, terfokus, dan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Di Kota Bima, pendekatan multi-sektoral diimplementasikan melalui pembentukan forum atau kelompok kerja multi-sektoral yang terdiri dari perwakilan dari masing-masing sektor terkait. Forum ini bertujuan untuk memfasilitasi koordinasi, komunikasi, dan pertukaran

informasi antar sektor, serta mengidentifikasi dan memprioritaskan program yang harus dijalankan secara bersama-sama.

Selain itu, integrasi data dan analisis kebijakan juga menjadi komponen penting dalam pendekatan multi-sektoral. Data dan informasi yang terkumpul dari berbagai sektor dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola kemiskinan yang lebih akurat, mengidentifikasi kelompok rentan yang perlu mendapatkan prioritas, serta mengevaluasi dampak dan keberhasilan program yang telah dilaksanakan.

Pendekatan multi-sektoral di Kota Bima juga memperhatikan aspek jender dalam pengentasan kemiskinan. Melibatkan perempuan secara aktif dalam perumusan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan memperkuat efektivitas dan keberlanjutan dari upaya pengentasan kemiskinan. Juga, penting untuk memastikan adanya konektivitas yang kuat antara program pengentasan kemiskinan dan program-program perlindungan sosial yang ada.

Namun yang paling penting bahwa implementasi pendekatan multi-sektoral di Kota Bima membutuhkan komitmen dan dukungan keuangan yang kuat dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Dukungan keuangan ini diperlukan untuk mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk merancang, mengimplementasikan, dan memantau kebijakan dan program yang terkait.

Selain itu, evaluasi dan pemantauan berkala juga sangat penting dalam pendekatan multi-sektoral. Melalui evaluasi yang teratur, dapat diidentifikasi kebijakan dan program yang berhasil serta kendala yang mungkin timbul. Hal ini akan memungkinkan adanya perbaikan dan penyesuaian yang terus menerus untuk memastikan efektivitas dan kesinambungan dari upaya pengentasan kemiskinan.

Sehingga dalam pendekatan multi-sektoral di Kota Bima merupakan sebuah inovasi kebijakan yang efektif dalam pengentasan kemiskinan. Dalam pendekatan ini, berbagai sektor pemerintahan, pemangku kepentingan, dan masyarakat bekerja sama untuk merancang, mengimplementasikan, dan memantau kebijakan dan program yang holistik, berfokus pada situasi lokal, dan melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak terkait.

Upaya menciptakan Dampak dan Keberlanjutan Kebijakan

Evaluasi dampak kebijakan pengentasan kemiskinan di Kota Bima menjadi hal penting untuk memastikan bahwa upaya-upaya yang dilakukan tidak hanya bersifat sesaat, tetapi memiliki efek positif yang berkelanjutan. Keseluruhan pembahasan menekankan pentingnya pendekatan holistik dan berkelanjutan dalam pengentasan kemiskinan. Kebijakan tidak hanya harus menanggapi aspek ekonomi, tetapi juga sosial dan lingkungan untuk mencapai dampak yang berkelanjutan.

Upaya menciptakan dampak dan keberlanjutan kebijakan pengentasan kemiskinan di Kota Bima mencakup berbagai strategi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini mencakup perlindungan keluarga, perubahan persepsi terhadap kemiskinan, pertimbangan terhadap jenis-jenis kemiskinan, serta ukuran kemiskinan seperti kemiskinan absolut dan relatif. Pemerintah Kota Bima juga memfokuskan diri pada tiga sasaran program untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, yang melibatkan instruksi untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem dan menargetkan tingkat kemiskinan 0% pada akhir 2024. Namun, tingkat kemiskinan ekstrem saat ini mencapai 1.32%, yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Data spesifik tentang kemiskinan ekstrem di Kota Bima serta tantangan yang dihadapi pemerintah dalam program bantuan sosial juga perlu diperhatikan untuk menciptakan kebijakan pengentasan kemiskinan yang berdampak dan berkelanjutan.

Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan

Penyelidikan mengenai tantangan dan hambatan dalam implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Kota Bima mencakup aspek-aspek seperti keterbatasan anggaran, resistensi masyarakat, dan kurangnya kapasitas pemerintah. Selain itu juga tantangan dalam mengintegrasikan program-program kesejahteraan sosial di Kota Bima menjadi topik pembahasan untuk merumuskan cara terbaik dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

Selain itu berdasarkan data sekunder yang relevan, tantangan dan hambatan dalam implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Kota Bima meliputi beberapa aspek kunci. Salah satunya adalah desain dan implementasi strategi kebijakan yang komprehensif untuk mendorong pertumbuhan yang lebih cepat dan mengurangi kemiskinan. Selain itu, terdapat hambatan dalam mengukur dan mendefinisikan kemiskinan ekstrim, serta memastikan keberlanjutan proses validasi data. Perlu juga diperhatikan data spesifik mengenai kemiskinan ekstrim di Bima dan tantangan yang dihadapi pemerintah dalam program bantuan sosial. Selain itu, terdapat hambatan tambahan seperti konsolidasi keamanan nasional, penanganan konsekuensi konflik, dan peningkatan kesetaraan regional yang juga menjadi tantangan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kota Bima. Meskipun demikian, upaya pengentasan kemiskinan di Kota Bima juga menghadapi tantangan praktis dan isu-isu yang perlu diatasi, seperti penyesuaian kebijakan pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendidikan dasar yang lemah.

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa inovasi kebijakan dalam pengentasan kemiskinan di Kota Bima memerlukan pendekatan holistik dan berkelanjutan. Analisis kondisi

kemiskinan, evaluasi kebijakan yang telah ada, dan identifikasi praktik terbaik menyoroti kebutuhan akan strategi yang lebih adaptif dan inklusif. Partisipasi aktif masyarakat, peran pemuda, dan kolaborasi antar sektor menjadi kunci untuk keberhasilan kebijakan pengentasan kemiskinan. Pemanfaatan teknologi, inklusi keuangan, dan pendekatan berbasis data dianggap penting dalam meningkatkan efektivitas kebijakan. Dengan menggabungkan pelajaran dari praktik terbaik, penelitian ini menekankan pentingnya memahami konteks lokal dan menerapkan inovasi yang relevan. Evaluasi dampak dan fokus pada keberlanjutan menjadi landasan untuk merancang kebijakan yang lebih efektif dan memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kemiskinan di Kota Bima.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Kota Bima. (2020). Kota Bima Dalam Angka 2020. Badan Pusat Statistik Kota Bima.
- Dewi, I. K., & Kusumawati, A. (2017). Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Daerah Pesisir Kota Bima. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 6(1), 10-22.
- Fitri, I., & Wibisono, H. (2019). Inovasi Kebijakan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di NTB. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 7(2), 134-144.
- Gunawan, A., & Mardanugraha, E. (2018). Analisis Kebijakan Publik dan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Bima. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 25-34.
- Hadi, R., & Amin, R. (2016). Kajian Evaluatif Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di NTB. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 5(2), 181-196.
- Handayani, W., & Saptandari, E. R. (2017). Community-Based Tourism as a Strategy for Poverty Alleviation: A Case Study in Yogyakarta, Indonesia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 227, 663-670.
- Indrawati, N. K., & Sulistyarningsih, I. M. (2019). The Role of Village-Owned Enterprises in Poverty Reduction: A Case Study in Karangasem Regency, Bali, Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 17(2), 143-156.
- Isfandiari, A., & Astuti, R. (2017). The Impact of Village Fund on Poverty Reduction: A Case Study in Subang Regency, Indonesia. *Journal of Public Administration and Governance*, 7(1), 95-105.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2021). Panduan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengentasan Kemiskinan. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Khakim, A. H., & Siregar, R. (2019). The Role of Microfinance Institutions in Reducing Poverty: A Case Study in Malang City, Indonesia. *Journal of Applied Economic Sciences*, 14(7), 1822-1833.
- Khadafi, M., & Saptandari, E. R. (2018). The Role of Social Capital in Poverty Alleviation: Case Study of Urban Poor in Surabaya, Indonesia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 227, 284-291.

- Kusumastuti, R. D., & Pratomo, Y. A. (2018). The Role of Microfinance in Poverty Alleviation: A Case Study in Semarang, Indonesia. *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura*, 21(1), 29-42.
- Lestari, N. S., & Suwignyo, A. (2016). Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kota Bima. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 20(1), 42-58.
- Maulana, A., & Indra, A. (2019). Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Pengentasan Kemiskinan di Kota Bima. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 55-66.
- Murtanto, S., & Widiastuti, Y. (2017). The Role of Women's Empowerment in Poverty Reduction: A Case Study in Grobogan Regency, Indonesia. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 10(1), 43-56.
- Nugraha, K., & Kusuma, H. (2017). The Impact of Microfinance on Poverty Alleviation: The Case of BRI Unit Desa in Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics, and Business*, 4(2), 5-15.
- Nursyamsiah, N., & Kuncoro, M. (2017). The Impact of Education on Poverty Alleviation in Indonesia: A Regional Perspective. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 20(3), 315-328.
- Nurhayati, N., & Kurniawati, N. (2018). Dampak Program Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Pengentasan Kemiskinan di NTB. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 8(2), 167-180.
- Nurhayati, N., & Suprpto, H. (2016). The Impact of Microfinance on Women's Empowerment and Poverty Alleviation: A Case Study in Yogyakarta, Indonesia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 219, 437-445.
- Pemerintah Kota Bima. (2019). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2019-2024. Kota Bima: Pemerintah Kota Bima.
- Prasetyowati, L., & Saptandari, E. R. (2015). The Role of Community Empowerment in Alleviating Poverty: A Case Study in Tegal City, Indonesia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211, 536-542.
- Puspitasari, D., & Hakim, D. (2019). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Bima. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 10-20.
- Ramdhani, F., & Purwanto, E. (2018). The Role of Microfinance Institutions in Poverty Reduction: A Case Study in Semarang City, Indonesia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 227, 399-406.
- Riani, A., & Wardani, R. (2017). Peran Inovasi Kebijakan dalam Pengentasan Kemiskinan di Daerah Tertinggal NTB. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani*, 1(1), 58-69.
- Riyanto, Y., & Hidayat, Y. (2018). Assessing the Impact of Village Fund on Poverty Reduction: A Case Study in Batu City, Indonesia. *Journal of Public Administration and Governance*, 8(3), 194-204.
- Rokhman, W. A., & Purwanto, E. (2016). Community-Based Tourism as a Strategy for Poverty Alleviation: A Case Study in Bantul, Yogyakarta. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 227, 642-648.
- Rokhman, W. A. (2017). The Impact of Social Capital on Poverty Alleviation: A Case Study in Sleman District, Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Pos dan Informatika*, 7(1), 13-24.
- Santoso, B., & Arifin, Z. (2020). Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan di Kota Bima. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 8(2), 153-168.

- Santoso, B., & Sulistiyanto, P. (2019). The Impact of Village Fund Allocation on Poverty Reduction: Evidence from Rural Areas in Indonesia. *Journal of Poverty and Sustainable Development*, 1(1), 25-34.
- Suharto, E. (2018). Evaluasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kota Bima. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 6(2), 127-140.
- Sulistiyono, A., & Asmara, R. (2018). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di NTB. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 6(3), 237-250.
- Widodo, A. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Program Pengentasan Kemiskinan: Studi Kasus Kota Bima. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 10(1), 67-84.